



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNIT KERJA : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BAIQ HONEY SUPRIHATIN**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **95866**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

1.528.240.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 305 m2/306 m2 di KOTA MATARAM ,
HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp.
32.000.000
3. Tanah Seluas 400 m2 di KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp.
45.000.000
4. Tanah Seluas 338 m2 di KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp.
35.000.000
5. Tanah Seluas 384 m2 di KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp.
300.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/100 m2 di KOTA MATARAM ,
HASIL SENDIRI Rp. 211.240.000
7. Tanah Seluas 480 m2 di KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp.
55.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 67 m2/42 m2 di KOTA MALANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

223.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 8.000.000



3. MOBIL, HONDA HRV - Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
195.000.000

4. MOTOR, HONDA BEAT MOTOR BEBEK METIK Tahun 2015,
HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 174.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.056.527.467

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.981.767.467

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.981.767.467

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **18 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.